

Pengelolaan Air Tanah Untuk Irigasi Berbasis Masyarakat Di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih

Endang Mintaria⁽¹⁾, Hartuti Purnaweni⁽²⁾, Tri Retnaningsih Soeprbowati⁽³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan, UNDIP, Semarang

⁽²⁾ Program Doktor Ilmu Lingkungan, UNDIP, Semarang

⁽³⁾ Fakultas Sains dan Matematika, UNDIP, Semarang

Email : emintaria@gmail.com

ABSTRACT

Water is one of the most important for agricultural development. Surface water is a main source for the supply of irrigation water. However, not all agricultural land can be supported with technical irrigation water sourced from the surface. The amount of groundwater use continues to increase which in turn influences the balance of the aquifer. Ground water is the source of water supply is very important, especially in areas with long dry season, related to dryness of the surface water. The presence of ground water is not constrained by administrative boundaries of an area, therefore the management of groundwater resources requires widespread holistic, and comprehensive thinking. There is a trend of an increase the utilization of ground water that have to be inline with the management and conservation of ground water.

The purpose of this study is to provide an overview of community-based management of ground water for irrigation rubber nurseries that have been implemented in the Pangkul Village Cambai District Prabumulih City. The method that used in this study is the focus group discussions. focus groups with respondents of farmer groups in the community include community participation in the planning, construction installation, implementation, utilization, monitoring and evaluation. From the results obtained that the management of ground water for irrigation in the rubber nursery had already well implemented. Community participation in planning and development phases are in the information level of participation. community participation in implementation and utilization phases are in the delegated power of participation. And the monitoring and evaluation phases are in therapy of participation.

Keywords: *Groundwater, function management, community participation.*

1. PENDAHULUAN

Dunia dihadapkan pada permasalahan pasokan air terutama kuantitas dan kualitas air tanah. Hasil penelitian Brown dan Haiwel (1998) di Propinsi Shandong, Cina, menunjukkan telah terjadi penurunan dalam penyediaan air irigasi kepada petani Cina sehingga menimbulkan kekhawatiran dunia. Hal tersebut menyebabkan peningkatan ancaman terhadap keamanan pangan. Cina tergantung pada lahan sawah irigasi air tanah untuk memproduksi 70% sereal (biji-bijian) bagi 1,2 miliar orang. Artinya, ratusan juta orang di Cina bergantung pada air tanah. Sutawan (2001) menjelaskan bahwa telah terjadi krisis air tanah di beberapa provinsi di Indonesia. Beberapa wilayah sangat mengandalkan air tanah untuk pengairan usaha pertanian. Terbatasnya sumber daya air tanah untuk irigasi pertanian seringkali memunculkan konflik kepentingan yang diakibatkan oleh persaingan dalam penggunaan air antara berbagai pengguna, alih fungsi lahan, hak penggunaan air yang tidak jelas, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kelemahan dalam kebijakan pengelolaan Sumberdaya air yang berwawasan konservasi. Pandangan ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketersediaan air tanah tidak hanya dalam perspektif mekanis saja namun merupakan satu kesatuan utuh dalam multi aspek, antara lain aspek politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Suripin (2004) berpendapat bahwa ketergantungan terhadap penggunaan air bersih telah mencapai lebih kurang 70% di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataannya air tanah merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan kerusakan air tanah berdampak luas dan sulit dipulihkan. Pandangan bahwa air untuk irigasi merupakan barang publik (*public goods*) menyebabkan masyarakat kurang efisien dalam menggunakan air. Secara ekonomi, ketidakjelasan tentang hak-hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air, menyebabkan organisasi asosiasi pemakai air kurang efektif. Mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air yang tidak berfungsi dengan baik akan terus menimbulkan konflik pengalokasian air.

Perangkat kebijakan dalam rangka pemanfaatan air tanah dalam rangka meminimasi munculnya konflik dan kerusakan lingkungan sangat diperlukan. Pemanfaatan air tanah yang mempertimbangkan kesesuaian daya dukung *aquifer* setempat yang penggunaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 tentang peraturan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi. Kebijakan-kebijakan tersebut memuat tata kelola air tanah, hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air tanah serta upaya konservasi air tanah. Penyerahan kewenangan hak kelola irigasi dari pemerintah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip melibatkan masyarakat secara aktif.

Kota Prabumulih merupakan pengembangan wilayah administrasi dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih menggantungkan tangkapan air dari daerah luar (daerah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu), Kota Prabumulih memiliki daerah resapan air yaitu pada sungai Kelekar Desa Pangkul. Pemanfaatan air tanah di Kota Prabumulih terus mengalami peningkatan. Fenomena ini terjadi akibat

penyediaan air oleh Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Prabumulih belum memadai (14% dari total kebutuhan masyarakat Kota Prabumulih), sehingga masyarakat menggunakan air bawah tanah untuk mencukupi kebutuhan, baik untuk keperluan air minum, rumah tangga, ataupun kegiatan usaha lainnya. Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih merupakan daerah resapan air untuk Kota Prabumulih berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Prabumulih tahun 2008 (Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, 2011).

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan air tanah untuk irigasi pembibitan karet di Desa Pangkul dilihat dari partisipasi masyarakat dalam fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta evaluasi.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan karena wilayah ini telah menerima bantuan sumur bor dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi meliputi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan/evaluasi. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) terhadap tiga kelompok tani penerima bantuan, yaitu kelompok tani Jati 2, Rukun Tani dan Tunas Baru. Teknik penentuan informan dengan metode *purposive* dari anggota kelompok tani penerima bantuan. Jumlah informan sebanyak 47 orang. Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan sebanyak satu kali di masing-masing masing-masing kelompok tani pada bulan Mei 2013. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi berdasarkan keterlibatan masyarakat menurut tangga partisipasi Arnstein (1969) dalam fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta evaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Desa Pangkul termasuk dalam wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif Desa Pangkul memiliki luas 9,5 km² dengan bagian utara berbatasan dengan Desa Lembak Kabupaten Muara Enim, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sindur Kota Prabumulih, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tapus Kabupaten Muara Enim dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemang Kabupaten Muara Enim. Jumlah penduduk Desa Pangkul tercatat berjumlah 3.144 jiwa atau 943 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk Desa Pangkul bermatapencaharian sebagai petani penangkar bibit karet (51,53%) (BPS, 2012).

Lembaga tani pengelola air disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Keberadaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara yuridiksi telah ada sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah. Peraturan yang lebih khusus mengenai P3A yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Organisasi P3A. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) awalnya dibentuk dengan pendekatan kebijakan *top down management*. Pola *top down management* merupakan suatu proses transfer pembangunan yang bersifat sentralistik Fungsi dan kegiatan dari P3A berada di bawah koordinasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) desa atau kelurahan. Pembangunan pertanian yang berbasis pada partisipasi masyarakat dikenal dengan pola pembangunan *bottom up management*. Petani terlibat langsung dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 yang memuat peraturan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi yang berwawasan konservasi dan partisipasi petani (Rachman, 2009). Syahyuti (2006) berpendapat bahwa kelembagaan tani berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif dan mandiri. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang dibentuk di setiap desa, juga harus menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip kemandirian lokal (*spesifik lokalita*), yang dicapai melalui prinsip otonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menerbitkan dua kebijakan berupa penancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025 dan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kelahiran undang-undang ini mempunyai makna sebagai upaya untuk mewujudkan revitalisasi pertanian arti luas, meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan. Pada kedua kebijakan tersebut, permasalahan kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Di tingkat makro, satu kelembagaan baru yang akan lahir adalah Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah non departemen, yang akan merumuskan secara terperinci tentang metode penyuluhan, strategi penyuluhan, dan kebijakan penyuluhan. Di tingkat mikro, pelaksanaan pembentuk beberapa lembaga tani misalnya Pos Penyuluhan Desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A.

Harold Koontz & O' Donnel (1989) yang mendefinisikan manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Fungsi Manajemen ialah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. George R. Terry. dia menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari *planning* (perencanaan),

organizing (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) (Ramli, 2012). Fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan irigasi air tanah untuk pembibitan di Desa Pangkul meliputi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan/evaluasi.

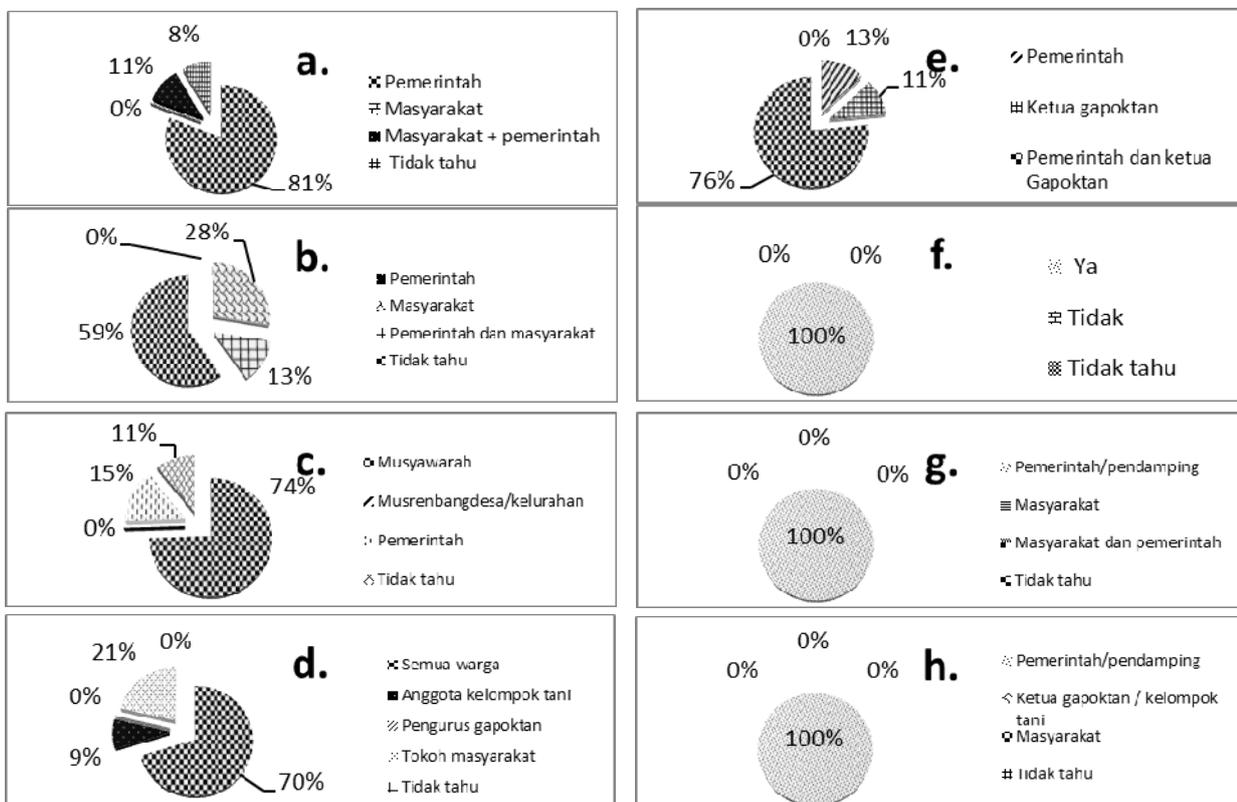
Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak (*affected people*). Keikutsertaan masyarakat membawa pengaruh yang positif (Hadi, 2009). Senada dengan Hadi, Sastropoetra (1988) mengemukakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan mental, fikiran dan emosi manusia dalam situasi kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Lemahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kekurangan kapasitas keberdayaan dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas baik pengetahuan maupun sikap (Budiati, 2012).

Menurut Arnstein (1969) kualitas partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari kualitas dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan diinterpretasikan dalam Tangga Partisipasi masyarakat. Tipologi (delapan) tangga partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut: *manipulation* atau manipulasi, *therapy* atau terapi, *information* atau pemberian informasi, *consultation* atau konsultasi, *placation* atau perujukan, *partnership* atau kemitraan, *delegated Power* atau perlimpahan kekuasaan, serta *citizen control* atau masyarakat yang mengontrol.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Tahap perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan bagian yang mempersiapkan segala sesuatu secara sistematis yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk menginterpretasikan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan instalasi sumur bor di Desa Pangkul ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain pembentukan kelompok tani, asal informasi, asal usulan, saluran usulan, pembuatan proposal kegiatan, kesempatan masyarakat memberikan usulan dan kehadiran dalam rapat.

Usulan kegiatan pembangunan desa umumnya disampaikan dalam forum-forum musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (musrenbangdes/kel) untuk kemudian dibahas pada musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan (musrenbangcam) dan musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda). Usulan permohonan kegiatan sumur bor Desa Pangkul disampaikan dalam musyawarah Gapoktan yang dihadiri semua anggota. Musyawarah menghasilkan keputusan membuat permohonan bantuan sumur bor kepada Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Uraian rangkaian perencanaan dapat dilihat pada gambar 1. Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui asal usulan pengajuan kegiatan sumur bor (59,57%), walaupun hadir dalam musyawarah Gapoktan, hanya 27,76% informan yang menyatakan bahwa usulan pengajuan kegiatan tersebut berasal dari masyarakat (ketua Gapoktan dan tokoh masyarakat). Informasi tentang kegiatan sumur bor disampaikan oleh PPL dan ketua Gapoktan (76,60%). Keterlibatan masyarakat tidak tercermin dalam proses penyusunan proposal kegiatan dan pengajuan usulan kepada Dinas Pertanian yang dilakukan oleh pendamping.



Gambar 1. Partisipasi Masyarakat Desa Pangkul dalam Perencanaan Sumur Bor (a. Asal usulan pembentukan kelompok tani; b. Asal usulan pengajuan kegiatan sumur bor; c. Saluran usulan; d. Undangan dalam rapat/musyawah; e. Asal informasi kegiatan sumur bor; f. Kesempatan memberikan usulan dan tanggapan; g. Penyusunan proposal; h. Pengajuan proposal

b. Partisipasi dalam Tahap Pembangunan

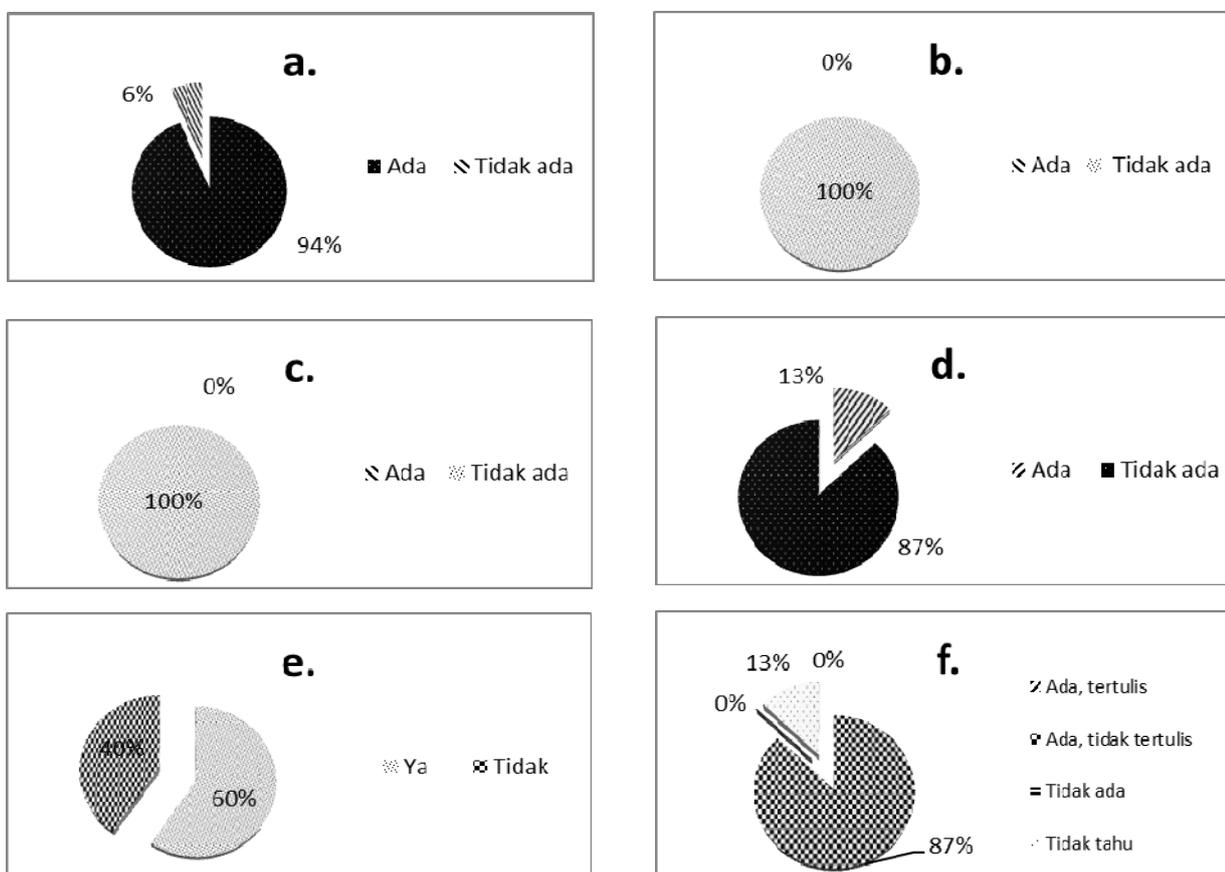
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan direduksi dan dianalisis dari diskusi kelompok terfokus dengan indikator keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, kesediaan pengorbanan, bentuk pengorbanan, informasi gotong royong, keikutsertaan dalam gotong royong dan pertemuan kelompok tani. Pembangunan instalasi tidak melibatkan masyarakat karena tukang yang mengerjakan kegiatan tersebut. Masyarakat tidak dipungut dana dalam pembangunan namun masyarakat berusaha untuk melibatkan diri dengan menyediakan makan dan minum untuk tukang (10,64%) serta melaksanakan gotong royong memasang instalasi pipa ke rumah-rumah (89,63%). Gotong royong juga dilakukan dalam kegiatan menguras sumur bor. Meskipun pembangunan dilaksanakan oleh tukang namun masyarakat merasakan puas dan senang dengan pola pembangunan tersebut. Menurut mereka pembangunan melalui kontraktor atau tukang membuat warga tidak merasa repot, anggota hanya mengawasi dan ikut gotong royong bila diperlukan.

Intensitas gotong royong dalam kelompok tani tidak berbanding dengan pertemuan kelompok tani yang hanya diadakan sekali pada saat perencanaan. Setelah perencanaan kelompok belum pernah melakukan pertemuan kelompok, namun komunikasi tetap berjalan karena anggota bertetangga. Komunikasi antar anggota juga dilakukan dalam memberikan informasi gotong royong (82,98%).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan tergolong dalam partisipasi *information* atau informasi. Anggota kelompok tani mengikuti pertemuan pembentukan kelompok tani dan diberikan informasi mengenai kegiatan sumur bor. Pemberi informasi adalah PPL dan ketua Gapoktan kepada anggota dalam forum pertemuan kelompok. Masyarakat pada pertemuan itu diberikan kesempatan untuk memberikan usulan, meskipun masyarakat tidak memanfaatkan peluang tersebut. Pada tahap pembangunan masyarakat menerima dan memberikan informasi tentang gotong royong dikarenakan mereka bertetangga meskipun mereka tidak pernah mengadakan pertemuan kelompok tani.

c. Partisipasi dalam Pelaksanaan

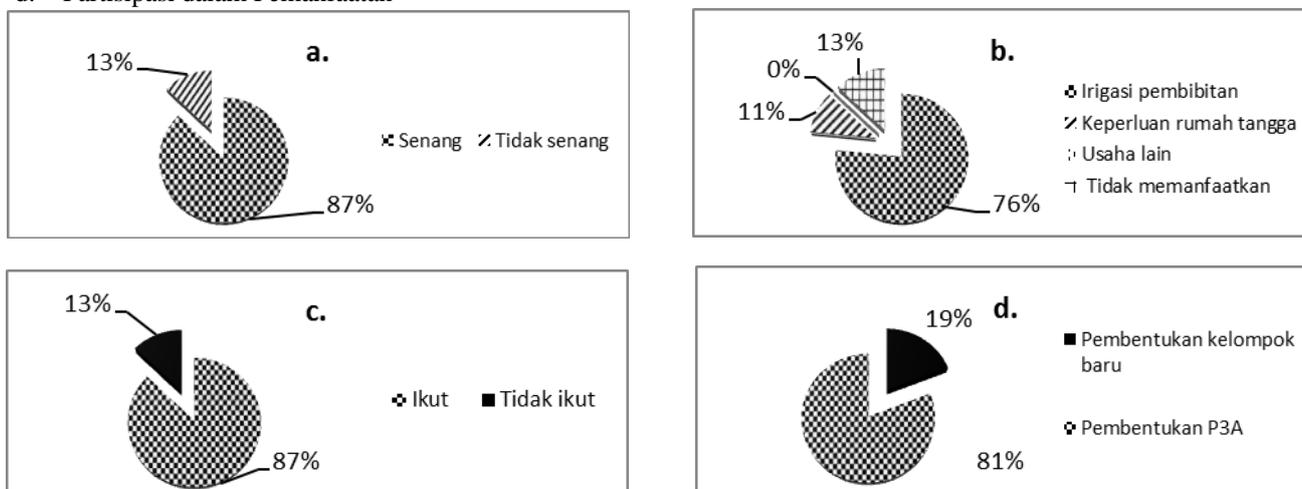
Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan irigasi sumur bor diserahkan sepenuhnya kepada warga anggota. Dalam tahap ini indikator yang menjadi acuan dalam diskusi meliputi kepengurusankelompok tani, pembayaran iuran kelompok, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keterlibatan tokoh masyarakat serta pembagian tugas dan jadwal dalam pelaksanaan.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Desa Pangkul dalam Pelaksanaan kegiatan Sumur Bor (a. Kepengurusan kelompok tani; b. Iuran kelompok; c. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga; d. Pembagian Tugas; e. Pembayaran Listrik f. Penjadwalan penggunaan)

Kelompok tani Jati 2, kelompok tani Rukun Tani dan kelompok tani Tunas Baru terdaftar dalam daftar gabungan kelompok tani (Gapoktan) Pangkul Manunggal Desa Pangkul sejak tahun 2010. Ketiga kelompok tani telah memiliki kepengurusan dan anggota namun belum menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggota yang membayar listrik secara mandiri sebanyak 28 orang (59,57%) yang berasal dari kelompok tani Jati 2 dan kelompok tani Rukun Tani sedangkan anggota kelompok tani Tunas Mandiri masih menggantungkan listrik dari rumah ketua kelompok. Anggota membayar listrik sendiri-sendiri sesuai dengan pemakaian air sehari-hari. Anggota merasa keberatan apabila pembayaran listrik dijadikan satu karena jumlah bibit karet yang diusahakan bervariasi. Cara ini diyakini anggota menjadi jalan keluar meminimasi timbulnya konflik pembayaran listrik akibat perbedaan pemakaian. Penjadwalan penggunaan disesuaikan dengan jumlah bibit karet yang anggota miliki. Komunikasi antar pemakai berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, begitu pun bila ada perselisihan maka diselesaikan secara kekeluargaan. Tokoh masyarakat (Kepala Desa dan Kepala Dusun) berperan penting dalam memediasi pihak yang berselisih. Perselisihan dan konflik yang timbul tidak dibawa dalam forum kelompok tani.

d. Partisipasi dalam Pemanfaatan



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat Desa Pangkul dalam Pemanfaatan Sumur Bor (a. Persepsi terhadap kegiatan sumur bor; b. Jenis pemanfaatan; c. Keikutsertaan dalam pemeliharaan; d. Usaha pengembangan)

Gambar 3 menunjukkan bahwa 87,24% anggota kelompok tani menyatakan senang dan terbantu dengan adanya bantuan sumur bor ini. Namun pada diskusi terdapat beberapa sanggahan dari anggota (12,76%) yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa senang karena belum dapat menyiram bibit karet disebabkan rumah mereka jauh dari instalasi. Anggota yang memanfaatkan air tersebut untuk keperluan sehari-hari (10,64%). Anggota yang memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari beralasan mendapatkan debit air yang kecil sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menyirami bibit karet.

Usaha pemeliharaan instalasi menjadi tanggung jawab bersama anggota yang memakai air (87,24%). Pemeliharaan meliputi perawatan mesin, pengecekan instalasi listrik, menutup pintu tower bila terjadi hujan dan pengamanan sumur bor dari pencurian. Anggota tidak pernah ditarik iuran atau sumbangan untuk pemeliharaan sehingga beban pemeliharaan dirasakan lebih berat oleh rumah tangga terdekat instalasi. Fakta terungkap bahwa beberapa anggota yang tidak mendapatkan manfaat sama sekali (12,76%) dari kegiatan ini menjadi antipati dan acuh tak acuh terhadap kegiatan ini serta menyatakan tidak ingin dilibatkan dalam penjadwalan pemeliharaan. Besarnya manfaat sumur bor terhadap manfaat menyebabkan usaha pengembangan pada masa mendatang penting dilakukan. Beberapa usaha pengembangan yang diusulkan oleh masyarakat adalah perubahan kelompok tani menjadi kelompok tani pengelola air berdasarkan kedekatan rumah (80,85%). Sehingga sumur bor dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi seluruh anggota.

Fakta-fakta fenomena di atas menunjukkan bahwa masyarakat telah dapat mengatur pelaksanaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan kelembagaan. Partisipasi ini menyebabkan keterlibatan ketua dan tokoh masyarakat menjadi tidak optimal. Partisipasi anggota kelompok tani pada tahap pelaksanaan dan pembangunan telah berada pada posisi *delegated power* atau perlimpahan kekuasaan, pada tingkat ini masyarakat diberikan kewenangan dan kebebasan dalam melaksanakan kegiatan, menjadwalkan penggunaan, bermusyawarah dan memutuskan siapa yang menjadi mediator bila terjadi perselisihan. Tingkat partisipasi masyarakat ini masih berdasarkan kedekatan kekeluargaan dan tetangga bukan dalam konteks kelembagaan tani yang seharusnya.

e. Partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi didasarkan pada pihak yang melakukan pengawasan, keberadaan kotak aduan, saluran aduan dan respon dalam penyelesaian masalah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pegawai Dirjen Prasarana dan Sarana kementerian Pertanian dengan dibantu Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih. Kegiatan pengawasan dan evaluasi diadakan sebanyak dua kali, yaitu pada saat penentuan titik dan pasca pembangunan instalasi. Kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut tercantum dalam pedoman teknis pengembangan sumber daya air kementerian Pertanian tahun 2012.

Kelompok tani tidak memiliki kotak aduan bila terjadi kerusakan atau timbul perselisihan. Perselisihan dan kerusakan instalasi ditanggung bersama antar pemakai air dengan prinsip musyawarah, kebersamaan, gotong royong dan kekeluargaan. Anggota merasa malu bila masalah kerusakan diketahui oleh pihak luar (PPL dan instansi). Namun anggota menghargai ketua Gapoktan untuk menengahi perselisihan yang timbul di antara anggota kelompok.

Fakta-fakta fenomena di atas menunjukkan bahwa partisipasi anggota pada kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dapat dikategorikan dalam tingkat *therapy* atau terapi. Anggota melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dan perilaku anggota lain namun tidak mengetahui bagaimana pengawasan dan evaluasi seharusnya. Anggota tidak dapat menggunakan saluran penyampaian keluhan kepada instansi terkait dikarenakan rasa malu dan tidak adanya kotak aduan. Masyarakat mengandalkan kebersamaan dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang timbul.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan air tanah untuk irigasi di Desa Pangkul dapat disimpulkan bahwa gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan air tanah untuk irigasi pembibitan karet di Desa Pangkul dilihat dari partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan sumur bor berdasarkan teori Arnstein pada level *information*, dalam proses pelaksanaan dan kegiatan pemanfaatan pada level *delegated power* dan dalam kegiatan pengawasan serta evaluasi berada pada level *therapy*.

4.1 Saran

Proses pengelolaan air tanah untuk irigasi pembibitan karet di Desa Pangkul yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan monitoring evaluasi hendaknya lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga keberadaannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pusbindiklatren Bappenas dan pemerintah Kota Prabumulih yang telah memberikan dukungan dan beasiswa selama menjalankan studi, penelitian hingga penulisan artikel jurnal ini. Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA sebagai pembimbing utama dan Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.AppSc sebagai pembimbing dalam penyelesaian penyelesaian makalah ini.

5. REFERENSI

- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning. Vol. 35 No. 4 Juli 1969.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih. 2008. *Laporan Akhir Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota prabumulih 2008-2027*. Kota Prabumulih.
- Badan pusat Statistik Kota Prabumulih. 2012. *Kecamatan Cambai dalam Angka*. Kota Prabumulih.
- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Brown, Lester and Brian Halweil. 1998. *Cina's Water Shortage Could Shake World Food Security*. World Watch. www.worldwatch.org/Cinas-water-shortage-could-shake-world-food-pdf. (Diakses tanggal 10 Oktober 2012).
- Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup. 2011. *Inventarisasi dan Pengawasan Pemanfaatan air Tanah*. Kota prabumulih.
- Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Kementerian Pertanian. 2012. *Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air*. Jakarta.
- Hadi, Sudharto. P. 2009. *Aspek Sosial Amdal: Sejarah, Teori dan Metode*. Gadjah mada University Press. Yogyakarta.
- Rachman, Benny dan Ketut Kariyasa. 2001. *Sistem Kelembagaan Pengelolaan Air irigasi dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Jurnal Litbang Pertanian 21(3): 109-144.
- Rachman, Benny. 2009. *Kebijakan Sistem kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten*. Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

- Ramli, Rusli dan Yunita Putri Koes Hardini. 2012. *Asas-Asas Manajemen*. Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Suripin. 2004. *Pelestarian Daya Tanah dan Air*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sutawan, Nyoman. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Udayana Press. Denpasar
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Bina Rena Pariwara. Jakarta.